BAGIAN III
TANGGAPAN ATAS TANGGAPAN

Politik Identitas dan Pluralisme Kita: Menanggapi Para Penanggap

Ahmad Syafii Maarif

Sepatah Pengantar

Pidato yang saya sampaikan di depan forum Nurcholish Madjid Memorial Lecture III, pada 21 Oktober 2009 di Aula Universitas Paramadina, Jakarta, telah mendapat tanggapan luas, khususnya dari kalangan akademik. Judul pidato yang diberikan kepada saya oleh Ihsan Ali-Fauzi, seorang *professional organizer* untuk kajian-kajian sosial, kemanusiaan, dan keagamaan adalah seperti yang menjadi judul buku ini. Ihsan adalah seorang sosok pintar dan punya banyak gagasan inovatif, tetapi rupanya tidak berminat menyelesaikan studi lanjutnya, setidak-tidaknya sampai hari ini. Terus terang saja, saya harus membolak-balik literatur, baik melalui buku-buku yang disiapkan Bung Ihsan mau pun via internet, untuk menyiapkan pidato di atas, sekalipun di sana-sini masih saja terdapat lobang-lobang dan titik lemah yang harus ditutupi. Rupanya telah pula disiapkan tujuh tanggapan tertulis yang disampaikan kepada saya untuk kemudian harus pula diberi tanggapan balik.

Mungkin karena kedekatan saya dengan almarhum Nurcholish Madjid, kampus Paramadina telah meminta saya untuk menyampaikan Nurcholish Madjid Memorial Lecture ini sejak yang pertama, tetapi tidak pernah kesampaian karena berbagai kesibukan. Baru

pada giliran ketiga, saya harus memenuhinya. Jika tidak demikian, rasanya ada sebuah beban moral terhadap almarhum yang selama karier intelektualnya tidak pernah lelah untuk menyampaikan gagasan-gagasan besar dan penting untuk kepentingan Islam, bangsa, dan kemanusiaan.

Dari sisi prinsip kesetaraan gender, dari tujuh penanggap tertulis, tiga di antaranya adalah pakar perempuan dengan disiplin keilmuannya, dan empat pakar laki-laki melalui pendekatannya masing-masing pula. Tujuh nama itu adalah: Siti Musdah Mulia, Yayah Khisbiyah, Asfinawati, Martin Lukito Sinaga, Eric Hiariej, Tony D. Pariela, dan Budiman Sudjatmiko. Sebagian besar para penanggap ini telah saya kenal, sebagian yang lain mungkin baru selintas. Ketujuh penanggap ini telah bekerja secara serius dan lugas, sekalipun masih saja terasa ada masalah-masalah penting yang tidak disentuh. Mungkin saja ada masalah krusial dalam pandangan saya, tetapi mungkin dinilai tidak sangat penting bagi sebagian penanggap, sesuatu yang lumrah belaka dalam dunia akademik. Tetapi secara keseluruhan saya berterima kasih kepada mereka semua yang sampai batas-batas yang jauh telah menutupi lobang-lobang yang masih ternganga dalam makalah yang telah saya sampaikan, lisan dan tertulis.

Jawaban atas Para Penanggap

Saya mulai dari tanggapan Siti Musdah Mulia, seorang pemikir perempuan yang sudah punya nama dunia, pembela gigih terhadap prinsip toleransi dan pluralisme. Di bawah judul "Politik Identitas: Ancaman bagi Masa Depan Pluralisme di Indonesia," penulis sepanjang lima halaman ketikan satu spasi telah menyuguhkan analisis yang cukup menarik dan relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Kalimat pertama yang diturunkannya adalah pandangan Nurcholish Madjid tentang bangsa Indonesia yang serba multi. Kutipannya: "Ada satu hal yang selalu ditekankan oleh Nurcholish Madjid saat bicara tentang kemajemukan Indonesia, yaitu bahwa keanekaragaman suku dan agama yang dimiliki negeri ini ini bukanlah sesuatu

yang layak dibangga-banggakan. Itu tidak unik, apalagi istemewa, dan bukan hanya dimiliki Indonesia."[1]

Dalam kutipan ini, pada hemat saya, Nurcholish dan Musdah benar sampai batas-batas tertentu, tetapi untuk mengatakan Indonesia sebagai multietnik dan multiagama tidak unik dan tak perlu dibanggakan, saya perlu memberi beberapa catatan. Dalam kajian saya, bangsa dan negara kepulauan yang terbesar dan terluas hanya terdapat satu di dunia, yaitu Indonesia, sebuah bangsa muda yang belum berusia 100 tahun. Jumlah pulaunya lebih dari 17.000, bahasa lokal dan etnisitas ratusan, agama pun bervariasi: Islam, Kristen/Katolik, Hindu, Budha, Konghucu, dan masih ada kepercayaan-kepercayaan lokal yang tidak dimasukkan dalam daftar resmi pemerintah. Islam yang dipeluk oleh mayoritas penduduk (sekitar 88, 22%),[2] dalam sistem iman secara relatif bersifat tunggal, tetapi sebagai ekspresi kultural-intelektual, paham agama, dan lebih-lebih politik, ternyata Islam itu sangat majemuk. Fenomena serupa juga berlaku pada agama-agama lain. Di lingkungan agama Katolik yang secara teologis terlihat lebih kompak, dalam ekspresi politik umat Katolik Indonesia juga tidak tunggal, tetapi plural, apalagi umat Protestan yang terdiri dari aneka sekte. Penganut Budha pun terbentuk dalam tiga sekte, begitu juga Hindu. Inilah fakta sosiologis yang terbentang di depan kita semua. Tetapi setelah bangsa ini merdeka sejak tahun 1945, semua etnisitas dan penganut agama itu *toh* masih setia kepada Indonesia sebagai bangsanya. Saya rasa ada sesuatu yang unik dan patut dibanggakan di sini, bukan?

Cobalah renungkan, sekiranya Bung Hatta dengan persetujuan beberapa pemimpin Islam pada 18 Agustus 1945 tidak mencoret tujuh kata dalam Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945, yang

---

[1]Lihat tanggapan Siti Musdah Mulia di buku ini juga.

[2]Lihat Leo Suryadinata, Evi Nurvidya Arifin, dan Aris Ananta, *Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape* (Singapore: Institute of Southeast Asia Studies, 2003), hal. 104, berdasarkan sensus penduduk tahun 2000.

semula memberikan posisi istimewa kepada golongan mayoritas, apakah keutuhan bangsa masih bisa bertahan sampai hari ini? Pada hemat saya, jawabannya negatif. Dalam perspektif ini, kearifan dan ketegasan pemimpin dalam mengelola kemajemukan dan menjinakkan politik identitas dalam situasi genting dan kritikal itu patut disyukuri dan peristiwa itu adalah unik dalam konteks sejarah ketika itu. Dalam upaya mencari solusi pada masalah-masalah krusial ini, Bung Karno sebagai presiden tampaknya lebih memercayakan kepada Hatta sebagai seorang yang dekat dengan mayoritas, apalagi ia dikenal sebagai tokoh jujur dan moralis sejati. Dalam konstelasi politik di tahun-tahun awal kemerdekaan itu, semua golongon berdiri di belakang Hatta, kecuali PKI (Partai Komunis Indonesia) yang menjadi musuh ideologinya sejak tahun 1950-an, saat partai ini berhasil melakukan konsolidasi kekuatan untuk "bermain" kembali di panggung politik nasional.

Selanjutnya, saya setuju bahwa hampir tidak ada masyarakat yang homogen di mana pun di muka bumi, bahkan termasuk kota-kota Vatikan, Makkah, dan Madinah, yang menurut Musdah merupakan kota-kota eksklusif. Catatan saya adalah bahwa eksklusivitas yang terkesan di kota-kota ini hendaknya dibaca dari sisi penganut agama yang tunggal, yaitu Katolik dan Islam, tetapi penduduknya tidak tunggal bila ditengok dari sisi etnisitas dan latar belakang sejarah, adat, dan bahasa. Memang, di kota-kota itu, ada sistem pengawasan sangat ketat terhadap kemungkinan munculnya "teologi penyimpangan", tetapi model pengawasan ini dalam jangka panjang dapat membunuh prinsip pluralisme yang merupakan pilar penting bagi bangunan peradaban asri dan toleran. Hengkangnya Hans Küng dari lingkungan Vatikan hendaklah dibaca sebagai akibat dari pengawasan yang ekstra ketat ini, sehingga para teolog yang berwawasan maju merasakan sesuatu yang pengap di sana.

Hal serupa telah berlaku di Saudi Arabia, yang sejak beberapa dasawarsa yang lalu telah membungkam mazhab lain selain Wahabisme. Bahkan berkat petro dolar, Islam dalam jubah Wahabisme dika-

takan sebagai Islam satu-satunya. Pemikiran keagamaan yang dikerangkeng dalam pasungan kekuasaan lambat atau cepat tak akan bertahan lama, pasti akan mencari jalan ke luar untuk menghirup udara kebebasan. Jiwa dan akal merdeka manusia tidak bisa berlama-lama dibenam dalam ketertindasan teologis atau politis.

Dalam kasus ini, politik identitas agama untuk meraih kebebasan menemukan pembenarannya. Setelah dibebaskan dari Vatikan yang ingin direformasinya itu, misalnya, Hans Küng justru memperoleh sambutan dari dunia bebas dengan sukacita; apalagi, dengan *Global Ethic Foundation* yang didirikannya sejak beberapa tahun yang lalu, ia telah semakin mengukuhkan namanya sebagai pemikir religius-bebas. Dalam sebuah artikelnya bulan Oktober 2009, Hans Küng menulis tentang keresahan di kalangan umat Katolik dunia:

> *Discontent over the ongoing resistance to reform is spreading to even the most faithful members of the Catholic church. Since the Second Vatican Council in the 60s, many episcopal conferences, pastors and believers have been calling for the abolition of the medieval prohibition of marriage for priests, a prohibition which, in the last few decades, has deprived almost half of our parishes of their own pastor. Time and again, the reformers have run into Ratzinger's stubborn, uncomprehending intransigence. And now these Catholic priests are expected to tolerate married, convert priests alongside themselves. When they want themselves to marry, should they first turn to Anglican, and then return to the church?*[3]

Kritik Hans Küng memang sudah sangat terbuka kepada publik dunia. Di akhir artikelnya, tokoh ini menegaskan: *"Just as we have seen over many centuries—in the east-west schism of the 11th century, in the 16th century Reformation and in the First Vatican Council of the 19th century—the Roman thirst for power divides Christianity and damages its own church. It is a tragedy."*[4]

Jadi jangan dikira Vatikan akan mampu memelihara keutuhan umat Katolik dalam jangka panjang secara teologis, sebagaimana

---

[3]Lihat Hans Küng, "The Vatican thirst for power divides Christianity and damages Catholicism," dalam *guardian.co.uk,* Tuesday, 27 Oct. 2009.

akan gagalnya Saudi Arabia mendoktrin umat Muslim dengan kurungan Islam monolitiknya, sebagaimana yang akan kita jelaskan pada tempatnya.

Musdah pasti lebih geram dibandingkan saya dalam mengamati perkembangan aliran teologis tak toleran yang dipaksakan di Saudi Arabia, seperti tak tolerannya kaum Syi'ah di Iran terhadap mazhab Islam lainnya. Padahal, bila ditilik dari sebab-sebab kemunculannya, semua aliran keagamaan itu tidak lain dari produk sejarah yang pasti terikat dengan zaman dan ruang yang mendorong atau memaksanya lahir ke panggung pergulatan kepentingan duniawi.

Oleh sebab itu, "pemberhalaan sejarah" yang diberi pembenaran teologis oleh para ulama bagi saya hanyalah akan menyebabkan peradaban Islam menjadi fosil, sebagaimana yang telah diderita selama beberapa abad belakangan ini. Melanjutkan suasana keislaman yang anti kebebasan ini sama artinya dengan mengunci pintu pencerahan bagi umat Islam yang jumlahnya semakin membesar dari tahun ke tahun. Sebuah Islam yang tak mampu mencerahkan zaman yang semakin sekuler bukanlah Islam profetik yang dulu pernah bermukim di hati dan otak nabi Muhammad dan para pengikutnya yang mula-mula. Dalam ungkapan al-Qur'an kita baca terjemahannya: "Alif Lâm Râ [inilah] Kitab yang Kami turunkan kepada engkau agar engkau keluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya pencerahan dengan izin Tuhan mereka menuju jalan Yang Maha Perkasa dan Maha Terpuji."[5]

Perkembangan Islam di Saudi perlu dicermati, bukan saja karena di sana prinsip pluralisme telah lama dibunuh, tetapi juga karena kerajaan ini telah mengekspor secara agresif dan besar-besaran paham keislamannya ke berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia, berkat petro-dolar yang menjadi tulang punggung finansialnya. Bagi saya, sesuai dengan prinsip pluralisme, setiap orang bisa saja mempengaruhi orang lain untuk menerima paham keagamaan atau ideologi yang dianggapnya benar. Tetapi kegaduhan akan timbul ketika orang mengabsolutkan

---

[4]*Ibid.*

[5]Al-Qur'an), surat Ibrahim (14):1.

paham itu dengan menilai paham lain palsu belaka. Dengan demikian tidak ada ruang yang tersedia untuk berbeda pendapat. Wahabisme cenderung memaksakan sikap serba absolut ini. Untuk membahas isu ini, saya akan meminjam tangan dua penulis Muslim yang saya nilai punya otoritas untuk berbicara tentang bahaya Wahabisme.

Pertama, analisis Khaled Abou El Fadl tentang corak Islam Saudi perlu kita cermati. Menurut *fâqih* kelahiran Kuwait ini, paham Islam Saudi sulit sekali memberi ruang kepada pihak lain untuk merayakan perbedaan pendapat. Paham ini menganggap metode dan proses jurisprudensi ulama klasik sebagai sesuatu yang tak mesti kompleks dan bahkan kacau-balau. El Fadl menulis:

> *The Wahhâbî movement hardly celebrates differences of opinions or juristic diversity. With the spread of the Wahhâbî influence in the Muslim world, the impact of the jurists mentioned above weakened considerably. It is difficult to evaluate whether these jurists have been marginalized, but the casual observer will notice that they are often considered heretical innovators in many contemporary circles… there is no doubt that Islamic jurisprudential heritage is complex and diverse, there is also no doubt that there are tremendous pressures in contemporary Islam to deny and negate this complexity.*[6]

Sikap menegasikan sesuatu yang kompleks dalam pemikiran hukum dapat berakibat fatal: daya intelektualisme akan menjadi tumpul, bahkan bisa menyuburkan kecenderungan anti-intelektualisme di bawah semboyan "kembali kepada al-Qur'an," sebuah semboyan yang hampa tanpa mengaitkannya dengan kekayaan pemikiran masa lampau. Fenomena semacam ini terlihat dalam Wahabisme: semuanya ingin didangkalkan, atau, dalam kalimat El Fadl, *"The end result is that the subtlety and richness of the Islamic legal heritage is largely absent in the contemporary age."*[7] Pendekatan yang serba dangkal dan kaku ini akan sangat menyulitkan kaum Muslim untuk

---

[6]Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women* (Oxford: One World Publications, 2001), hal. 17-18.

[7]*Ibid*., hal. 174.

menawarkan pesan-pesan universal Islam untuk kepentingan kemanusiaan kontemporer. El Fadl melihat Wahabisme sebagai simplistik dan naif: *"This approach, besides being ahistorical, proved to be hopelessly simplistic and naïve – it was impossible to return to the Qur'an and Sunnah in a vacuum."*[8] Dari sudut pandangan pluralisme, klaim kaum Wahabi sebagai wakil dari *"the true and real Islam"*[9] tidak lain dari sikap otoritarian yang mematikan pemikiran kritikal dan kreatif.

Kedua, kita tengok pula selintas pandangan Fazlur Rahman. Amat disayangkan, Wahabisme yang semula ingin menghapuskan praktik-praktik syirik dan segala bentuk bid'ah yang merusak jiwa umat Islam, dalam perkembangannya malah menjadi anti-intelektualisme, atau, dalam istilah Fazlur Rahman, yang muncul malah *"ultra-conservatism and almost absolute literalism."*[10] Gerakan Wahabi tidak hanya terbatas pada ranah keagamaan yang bersifat ultra-konservatif dan sepenuhnya bercorak harfiah, kaum Wahabi juga terlibat dalam gerakan politik-militer dalam upaya melumpuhkan kekuatan lawan pahamnya. Maka perkawinan antara Wahabisme dan dinasti Saud yang sekarang berkuasa di Saudi Arabia adalah hasil dari *"violent militarism"*[11] (militerisme keras) yang dipukulkan kepada lawan-lawan politiknya dengan korban umat seagama yang cukup banyak.

Istilah lain yang digunakan Rahman untuk Wahabisme adalah "neorivivalisme atau neofundamentalisme" yang menjadi penghalang reformasi dalam Islam.[12] Di tangan Wahabisme kebangkrutan intelektualime Islam tidak bisa dielakkan lagi. Semboyan mereka adalah untuk kembali kepada al-Qur'an, tapi yang terjadi malah

---

[8]*Ibid.*

[9]*Ibid.*, hal. 176.

[10]Lihat Fazlur Rahman, *Islam* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1979), hal. 198.

[11]*Ibid.*, hal. 200.

[12]Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago & London: The University of Chicago Press, 1982), hal. 136.

sebaliknya: para penganutnya semakin jauh dari al-Qur'an, kecuali dalam hal-hal ritual dan perkara kecil-kecil. Seorang neorevivalis, menurut Rahman, *"... really rooted neither in the Qur'ân nor in traditional intellectual culture, of which he knows practically nothing. Because he has no serious intellectual depth or breadth, his consolation and pride both are to chant ceaselessly the song that Islam is 'very simple' and 'straightforward,' without knowing what these words mean."*[13]

Sengaja dua pandangan otoritatif di atas saya gunakan untuk menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok-kelompok Muslim radikal dan militan yang masih terlihat di berbagai bagian dunia umumnya menganut paham keagamaan yang serba simplistik itu. Saya berterimakasih kepada Profesor Musdah Mulia yang telah menyinggung Vatikan dan Makkah-Madinah di awal tanggapannya. Tanpa penyebutan itu, otak saya tidak akan berkelana jauh untuk meneropong fenomena anti-reformasi, baik di Vatikan maupun di Saudi Arabia. Bedanya, jika Vatikan menghargai intelektualisme, sekalipun menutup diri untuk reformasi, di Saudi gerakan intelektual dan reformasi sudah lama absen karena mereka mengklaim bahwa Wahabisme sudah menemukan *"the true and real Islam."* Di sinilah tragedi itu berlaku, untuk sampai kapan? Tak seorang pun bisa mengatakannya sekarang. Tetapi, seperti telah disinggung di depan, dalam jangka panjang, tidak ada kekuatan apa pun, agama, petrodolar, dan militer, yang mampu membunuh kreativitas otak manusia untuk mencari jalan yang lebih baik dan cara hidup yang lebih segar bagi kepentingan keadilan dan kemanusiaan.

Sekarang giliran saya menanggapi Yayah Khisbiyah. Dalam tanggapannya sepanjang tujuh halaman lebih ketikan satu spasi, penulis asal Cirebon ini telah memperkaya wawasan saya tentang bagaimana "Membangun Harmoni di Masyarakat Plural: Pandangan Psikologi dan Pedagogi Perdamaian." Sebagai seorang yang tidak mendalami psikologi dan pedagogi perdamaian, ulasan dalam

[13] *Ibid.*, hal. 137.

makalah ini sungguh penting diikuti jika kita ingin agar pilar-pilar pluralisme dan toleransi menjadi hari depan Indonesia yang multietnis dan multiagama. Karena tulisan Yayah lebih banyak menutupi celah-celah yang terdapat dalam pidato saya yang memang miskin dalam nuansa psikologis dan pedagogis, saya tidak akan memberi tanggapan panjang, kecuali memberi komentar terhadap pendapat William T. Cavanaugh yang dikutip Yayah di bagian akhir tanggapannya.

Menurut Cavanaugh dalam bukunya *The Myth of Religious Violence* (2009), sebagaimana yang terbaca dalam tanggapan Yayah, "... tidak satu pun agama yang membawakan gagasan dan pesan kekerasan. Kekerasan muncul karena manipulasi ekonomi dan politik yang kerap dilakukan oleh negara-bangsa sekular dalam mempromosikan demokrasi liberal di wilayah-wilayah dan peradaban yang menjadi target politik hegemoninya sebagai kelanjutan dari imperialisme berformat baru." Kesimpulan semacam ini mungkin benar jika radius pengamatan kita terbatas pada konstelasi dunia di abad-abad terakhir atau katakanlah sejak abad ke-16 saat Barat melemparkan tali lasso-nya untuk mencekik leher bangsa-bangsa lain, khususnya leher umat Islam, untuk meminjam ungkapan A.J. Toynbee.[14] Sejak abad itu hampir seluruh bangsa Muslim jatuh ke tangan penjajahan yang sangat menghina dan menghancurkan. Sistem penjajahan hanya bisa dilakukan melalui kekerasan senjata, dan itu berlangsung berabad-abad, dan baru usai secara berangsur pasca Perang Dunia II (1939-1945).

Bahwa tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan, saya setuju. Tetapi mencari pembenaran agama untuk tindakan kekerasan adalah pula fakta keras sejarah. Semua buku sejarah akan bercerita bahwa fondasi imperium Abbasiyah (750-1258) ditegakkan di atas tengkorak dinasti Umayyah (661-749). Hampir seluruh keturunan

[14]Lihat A. J. Toynbee, *Civilization on Trial and the World and the West* (Cleveland and New York: The World Publishing Company, 1963), hal. 248.

Umayyah dibinasakan, kecuali yang berhasil lolos ke Spanyol, yang kemudian membangun kekuasaan dan peradaban Islam di kawasan itu selama tujuh abad. Kekerasan ini berlaku jauh sebelum munculnya demokrasi liberal dan ekonomi pasar yang memang telah menimbulkan malapetaka dan kemiskinan di berbagai bagian bumi. Sebuah buku yang ditulis Farag Fouda, *Kebenaran yang Hilang*,[15] akan membantu orang untuk berkaca secara obyektif dan faktual tentang sisi-sisi gelap sejarah Islam klasik yang tidak bisa lagi ditutupi. Tindak kekerasan atas nama agama memang bukan monopoli orang Islam, penganut agama lain juga telah melakukan kekerasan serupa di berbagai periode sejarah.

Tanggapan yang sangat bagus atas pidato saya juga diberikan oleh penggiat HAM Asfinawati, dengan judul "HAM, Dialog dan Masa Depan Pluralisme di Indonesia." Dengan sumber literatur yang cukup komprehensif, tanggapan ini sangat jeli meneropong keterkaitan HAM dengan prinsip toleransi dan pluralisme. Pada alinea pertama halaman 1, Asfinawati mengutip kesimpulan saya bahwa politik identitas tidak akan membahayakan keutuhan Indonesia di masa depan, tetapi dikatakannya juga bahwa ini adalah kesimpulan yang meloncat "tanpa menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkannya." Jika kutipan itu dibaca secara lengkap, mungkin loncatan itu tidak jauh. Asli kesimpulan saya berbunyi:

> Politik identitas dalam bentuk apa pun tidak akan membahayakan bangsa dan negara ini di masa depan, selama cita-cita para pendiri bangsa tentang persatuan dan integrasi nasional, semangat Sumpah Pemuda yang telah melebur sentimen kesukuan, dan Pancasila sebagai dasar filosofi negara tidak dibiarkan tergantung di awang-awang, tetapi dihayati dan dilaksanakan dengan sungguh-sumgguh dan penuh tanggungjawab. Kesungguhan dan

[15]Buku Fouda ini, yang aslinya ditulis dalam bahasa Arab dengan judul *al-Haqîqah al-Ghaybah*, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Novriantoni Kahar dan diterbitkan oleh Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, pada 2008. Farag Fouda (1945-1992), pemikir dan aktivis HAM Mesir, mati dibunuh oleh kelompok teror bertopeng dan berbendera Islam pada tahun 1992.

> tanggungjawab inilah yang sering benar dipermainkan oleh orang yang larut dalam pragmatisme politik yang tuna-moral dan tuna-visi. Sikap semacam inilah yang menjadi musuh terbesar bagi Indonesia, dulu, sekarang, dan di masa datang.[16]

Kutipan ini jelas memuat syarat bahwa bahaya masa depan itu akan bisa dicegah jika cita-cita besar para pendiri bangsa, semangat Sumpah Pemuda, dan Pancasila dijadikan acuan bertindak oleh semua pihak. Jika syarat itu diabaikan, maka segala kemungkinan yang menghancurkan bisa saja terjadi. Politik identitas yang diusung oleh kelompok-kelompok radikal tidak mau hirau dengan syarat yang sudah disepakati itu. Mereka adalah kelompok a-historis. Inilah yang merisaukan saya, sekalipun sebenarnya manakala tujuan kemerdekaan berupa tegaknya keadilan buat semua dapat diwujudkan, maka golongan a-historis ini akan kehilangan bumi tempat berpijak. Dengan kata lain, gejala mereka hanyalah bersifat sementara.

Kemudian, apresiasi terhadap HAM menjadi fokus utama Asfinawati, yang dikatakan tidak bersifat Barat atau Timur. Saya setuju, tetapi orang akan curiga terhadap gerakan HAM oleh pihak Barat, karena pada waktu yang sama pelanggaran HAM besar-besaraan mereka lakukan tanpa menghiraukan hukum internasional. Ini berlaku di Palestina oleh Zionis Israel dengan dukungan Amerika. Kemudian, Afghanistan menjadi hancur lebur dengan dalih memerangi terorisme, tetapi setelah sekian tahun, Amerika dan sekutunya seperti telah kehabisan akal karena tujuannya tidak semakin mendekati kenyataan sampai Presiden Bush digantikan oleh Barack H. Obama pada Januari tahun 2009. Kesalahan fatal dari pihak Amerika dan sekutunya adalah karena mereka gagal membaca aspirasi rakyat Afghanistan yang anti-penjajahan. Kekuatan negara miskin yang terdiri dari banyak suku yang belum tentu selalu akur ini terletak pada semangatnya yang tidak mau dijajah. Di masa kolonial, pada saat hampir seluruh bangsa Muslim jatuh ke tangan

[16]Lihat teks pidato saya yang dimuat di buku ini juga.

penjajahan Barat, Afghanistan terhindar dari itu. Dalih perang melawan terorisme menjadi tidak efektif karena di mata rakyat Afghanistan pasukan asing yang berada di negaranya adalah bentuk lain dari penjajahan. Ujungnya, isu tentang pelanggaran HAM oleh Taliban misalnya menjadi kehilangan makna di sana.

Menyusul kemudian Irak, yang juga dihancurkan dengan dalih bahwa Saddam Hussein menyimpan senjata pembunuh massal, yang ternyata sama sekali tidak terbukti. Dalam dialog tokoh-tokoh lintas iman dengan George W. Bush di Bali pada 22 Oktober 2003, saya tanyakan kepadanya tentang hak moral Amerika untuk menggempur Irak. Ketika itu dijawab bahwa Saddam adalah orang jahat yang membahayakan perdamaian dunia, sebuah jawaban yang dicari-cari. Bahwa Saddam adalah pelanggar HAM berat terhadap rakyatnya sendiri, itu tidak diragukan, termasuk terhadap saudara-saudaranya sendiri yang dianggap berbahaya bagi kelangsungan kekuasaannya. Tetapi masalahnya adalah apa hak negara asing untuk melakukan invasi terhadap Irak yang berdaulat penuh? Adapun tentang munculnya protes dari Amnesti Internasional dan Human Rights Watch yang disinggung oleh Asfinawati, terhadap politik luar negeri Amerika yang ekspansif dan tentang pelanggaran HAM di Guantanamo, tingkatnya hanyalah sebatas protes moral, sebab negara adidaya ini tidak mau tahu dengan semuanya itu. Dalam ungkapan lain, penolakan terhadap HAM oleh sementara orang Islam bukan karena substansi yang terkandung dalam HAM itu, tetapi prilaku zalim negara Barat tertentu atas bangsa-bangsa Muslim telah menghilangkan *trust* mereka terhadap maksud-maksud jahat di belakang isu HAM itu.

Saya setuju dengan dua langkah kongkret yang diusulkan Asfinawati di akhir tulisannya: (1) perlunya penegakan hukum dalam perspektif HAM; dan (2) perlunya dialog antara kelompok-kelompok yang berseberangan. Untuk langkah kedua, saya punya catatan, yaitu pengalaman menunjukkan bahwa mereka yang berada dalam kategori fundamentalis akan sangat sulit diajak berdialog secara jujur

dan terbuka. Sebagaimana telah saya jelaskan dalam tulisan saya, filosofi kaum fundamentalis, apa pun agama dan ideologi politik mereka, serupa saja: *"either with us, or, against us."* Filosofi *semau gue* inilah yang menjadi penghalang utama bagi berhasilnya sebuah dialog atas dasar persamaan posisi. Tetapi kita pun percaya bahwa tidak ada yang beku dalam diri manusia normal. Rangsangan dari luar berupa perubahan suasana, pergaulan, bacaan, dan kondisi ekonomi, bisa mengubah seorang fundamentalis menjadi pluralis.

Sekiranya Israel mau meninggalkan Zionisme yang rasis-fundamentalis dan kemerdekaan Palestina menjadi kenyataan, gerakan fundamentalis di dunia Islam pasti akan menyusut. Persoalannya adalah: siapa yang bisa mengubah watak Zionisme agar barsahabat dengan kemanusiaan dan perdamaian? Di awal abad ke-21, Zionisme sudah semakin kehilangan teman karena akal bulusnya tidak efektif lagi. Dengan demikian ada harapan bahwa fundamentalisme di kalangan Muslim akan kehilangan *raison d'tre*-nya, sebab masalah Palestina inilah sebenarnya yang menjadi pemicu utama bagi prilaku ganjil (anomali) mereka yang sering destruktif itu. Masalah lain yang mendesak diperjuangkan oleh negara-negara Muslim ialah perombakan total struktur Dewan Keamanan PBB agar mereka dapat menduduki posisi sebagai anggota tetap di dewan itu. Amerika Serikat selama ini hampir selalu menggunakan hak vetonya jika kepentingan Israel terganggu. Kesadaran global untuk menciptakan dunia yang lebih beradab perlu disuarakan terus menerus, termasuk oleh Amnesti Internasional, Human Rights Watch dan badan-badan lain yang cinta perdamaian dan tegaknya keadilan semesta.

Sekarang saya beralih ke para penanggap laki-laki. Saya mulai dengan tanggapan keempat dari Dr. Martin Lukito Sinaga, dengan judul "Melangkaui Politik Indentitas, Menghidupi Dinamika Indentitas," sepanjang enam halaman. Fokus tanggapan ini sudah dapat dibaca dalam judulnya yang puitis, yaitu politik identitas dilangkaui, sedangkan dinamika identitas dibiarkan hidup berkembang. Cukup ideal tawaran Dr. Martin ini, tetapi dalam proses implementasinya akan

menjumpai batu sandungan yang tidak sederhana, sekalipun bukan sesuatu yang mustahil. Dr. Martin mengusulkan untuk melangkaui politik identitas agar tidak mengkristal menjadi penghambat pencapaian tujuan bersama, atau katakanlah tujuan itu berupa keutuhan sebuah bangsa dan negara dengan terjamin tegaknya prinsip keadilan dan pluralisme. Sebagaimana telah disinggung dalam pidato saya, politik identitas tidak selamanya merusak, tergantung konteksnya dalam perjalanan sejarah sebuah bangsa. Virus ini baru merusak manakala perumahan sebuah bangsa dan fabrik sosial diobrak-abriknya. Bagi saya proses penjinakan politik identitas diperlukan, dibunuh tidak, sebab dalam kasus-kasus tertentu fungsinya penting, seperti tuntutan keadilan dari masyarakat Latino di Amerika misalnya. Untuk Indonesia, tuntutan kawasan luar Jawa bagi pemerataan pembangunan dapat dikategorikan sebagai bagian dari politik identitas yang logis dan perlu didengar oleh Jakarta.

Bung Martin juga berbicara tentang proses pembentukan sebuah *nation-state* (negara-bangsa) bagi Indonesia yang ternyata tidak mudah. Berbeda dengan pendapat banyak penulis, Indonesia sebagai bangsa bagi saya adalah produk baru yang belum berumur satu abad. Dengan demikian masih belum stabil secara politik dan kultural. Saya tidak bisa membayangkan Indonesia sebagai bangsa akan muncul ke peta dunia tanpa didahului oleh sistem penjajahan. Dengan segala brutalitasnya atas rakyat Nusantara, kaum penjajah juga punya jasa: menggiring terbentuknya Indonesia sebagai bangsa dan pada Agustus 1945 menyatakan sebagai negara merdeka. Adalah sebuah mitos yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia telah berusia berabad-abad, diawali oleh kegiatan Hindu di Kutai pada abad ke-5. Bahwa kemudian Kutai, Tarumanegara, dan puluhan kerajaan lain tumbuh mekar di bumi Nusantara dalam bilangan abad yang panjang, menjadi modal bagi terciptanya Indonesia sebagai bangsa pada dasawarsa 1920-an, adalah fakta sejarah. Dalam perspektif ini, apa yang sering disampaikan Bung Karno *tempo doeloe* tentang *nation and character building* menemukan kepentingan sentralnya, bahkan

di era pasca-proklamasi. Indonesia bukanlah sesuatu yang *given*, tetapi masih dalam proses menjadi (*becoming*).

Kesalahan kita sebagai bangsa, terutama kaum elitnya, adalah kelalaian kolektif dalam memperkuat dan mempercepat proses pembentukan bangsa dan karakternya yang masih labil itu. Sebagian kita dihibur oleh mitos di atas bahwa pilar-pilar kebangsaan kita telah kukuh karena punya akar sejarah yang jauh di masa silam. Maka untuk ke depan saya setuju dengan pendapat sementara orang bahwa Indonesia memerlukan desain ulang berdasarkan fakta sejarah yang kuat, bukan atas mitologi yang menyesatkan. Bung Martin menyatakan: "Kita memang berhadapan dengan proses dan pilihan historis yang besar di sini. Namun kalau pilihan *non-politis* ini diambil oleh agama, tampaknya ia akan bebas dari nestapa dan lubang hitam politik identitas itu sendiri."[17] Saya dukung harapan semacam ini, dengan catatan bahwa penganut agama itu sendiri juga harus membereskan suasana internal yang tidak sederhana dalam lingkungannya masing-masing. Politik identitas yang dijinakkan secara empirik sebenarnya bukanlah "lubang hitam" yang mesti ditakuti.

Dalam tanggapan kelima, Bung Eric Hiariej merumuskan tanggapannya yang kritis dalam formula "Pluralisme, Politik Identitas dan Krisis Identitas." Rasanya secara umum saya sudah menjelaskan apa yang dimaksud politik identitas itu yang tampaknya belum begitu terang bagi Bung Eric. Juga sudah saya katakan bahwa politik identitas untuk menuntut keadilan dan perlakuan wajar bukanlah sesuatu yang harus dikutuk. Saya harap Bung Eric membaca lagi pidato saya itu, di mana pandangan saya sebenarnya tidaklah terlalu bertolak belakang dengan apa yang dikemukakannya. Tetapi jika saya mengeritik golongan salafi dan Islamis yang radikal dan militan, itu bukan karena mereka *"have no right to narrate their position,"* tetapi karena filosofi mereka yang umumnya anti-dialog dan pluralisme sangat menganggu pikiran saya. Bung Eric benar, radikalisme tidak identik dengan

[17]Lihat tanggapan Martin dalam buku ini juga.

terorisme. Catatan saya adalah bahwa radikalisme yang tak terkendali oleh akal sehat punya potensi untuk berubah menjadi terorisme.

Seorang Osama bin Ladin yang melawan dominasi Amerika dan hegemoni dinasti Saudi yang eksploitatif bisa dipahami. Tetapi jika perlawanan itu juga ditujukan kepada siapa saja yang tidak setuju dengan cara kekerasan yang ditempuhnya dalam mencapai tujuan, lalu darah mereka menjadi halal, bagi saya itu adalah sebuah kebiadaban yang tidak dapat dimaafkan. Dalam kasus semacam ini, agama yang mengajarkan perdamaian dan persaudaraan universal antar manusia menjadi terdistorsi secara fatal.

Bagi saya, jika sebuah gagasan yang baru bermukim dalam pikiran atau angan-angan, betapa pun radikalnya, seperti Asfinawati dengan baik menjelaskan dalam tanggapannya, tidak ada masalah. Tak seorang pun punya hak untuk menghukum sebuah gagasan atau paham, dalam format teror sekalipun. Yang kita persoalkan adalah jika gagasan itu diaktualisasikan di bawah jubah politik identitas misalnya, tetapi yang menghancurkan perumahan masyarakat dan kemanusiaan. Apakah hal itu masih perlu juga diberi ruang gerak? Posmodernisme memang cenderung merelatifkan semua prinsip moral. Jika demikian, lalu apa bedanya dengan nihilisme yang dengan tajam dirumuskan F. Nietzsche di mana *"... man rolls from the centre toward X."*[18] Situasi akan menjadi semakin runyam dan menyesakkan nafas, ketika Tuhan sebagai sumber nilai-nilai tertinggi, untuk mengutip Martin Heidegger,[19] digunakan untuk membenarkan tindak kekerasan dan bahkan teror. Bukankah ini berarti sebuah *hara-kiri* bagi peradaban? Saya tahu Bung Eric tidak menjurus ke sana. Yang menjadi perhatian utamanya, jika pembacaan saya benar, adalah agar tidak berlaku penindasan terhadap siapa saja, di mana saja, dan dengan dalih apa pun.

---

[18]Lihat Ginni Vattimo, *The End of Modernity: Nihilism and Hermeneutics in Postmodern Culture*, trans. by Jon R. Snyder (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1991), hal. 19.

[19]*Ibid*., hal. 21.

Akhirnya, percayalah Bung Eric, kita berada dalam satu biduk untuk melawan segala bentuk ketidakadilan, karena sikap itu sudah lama menyatu secara organik dengan bangunan keimanan saya sebagai seorang Muslim.

Dalam tanggapan keenam, Bung Tonny D. Pariela menulis tanggapan dalam kaitannya dengan proses keindonesiaan dengan judul "Menjadi 'Orang Indonesia,'" berdasarkan kajiannya atas desa Wayame di Maluku. Kajian ini memberi alasan empirik yang sangat positif untuk memperkuat optimisme kita bahwa bangunan keindonesiaan yang utuh dan mantap bukanlah sebuah ilusi, asal semua kita ini mau bergerak ke arah itu dengan penuh kesadaran dan kejujuran. Sebagai seorang yang sudah bertahun-tahun meneriakkan agar Indonesia sebagai bangsa dan negara jangan sampai masuk ke dalam museum sejarah, tanggapan Bung Tonny sangat melegakan dan membahagiakan saya.

Karena tidak ada butir krusial yang perlu saya tanggapi, baiklah saya mengutip kalimat Bung Tonny tentang nasionalisme, yang telah sejak lama menjadi nilai anutan saya:

> ... nasionalisme kebangsaan sebaiknya tidak ditumbuhkan atas dasar kesadaran tentang kesatuan, tetapi nasionalisme yang berkembang berdasarkan kesadaran akan perbedaan dalam semangat persatuan; dan dengan demikian maka perbedaan itu sendiri akan memperoleh tempat yang layak dan terhormat..., hal itu hanya mungkin terwujud bilamana proses politik terfasilitasi berbanding lurus dengan proses sosiologis.[20]

Sejalan dengan semangat kutipan ini, saya pernah mengusulkan agar konsep NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) diubah menjadi NPRI (Negara Persatuan Republik Indonesia), sesuatu yang masih sangat peka di telinga sebagian elit kita sekarang ini.

Akhirnya, saya ingin beralih ke tanggapan Bung Budiman Sudjatmiko. Judul tanggapannya agak panjang: "Politik Aliran dalam

---

[20]Lihat tanggapan Tonny D. Pariela dalam buku ini juga.

Pancasila: Keniscayaan Sejarah dan Antitesis Fundamentalisme". Saya tidak perlu mengulas banyak tanggapan ini, karena isinya memperkaya dan menutupi bagian-bagian yang lemah dari apa yang telah saya paparkan. Kritik Bung Budiman terhadap sistem ekonomi pasar (neoliberalisme) saya garisbawahi untuk menjadi perhatian serius oleh kita semua, jika memang bangsa ini tidak mau memberikan batang lehernya untuk disembelih oleh pihak asing sebagai kelanjutan dari bentuk imperialisme kuna yang tidak kenal rumus keadilan global. Para ekonom Indonesia yang membela sistem ekonoimi pasar ini perlu membaca lagi tulisan-tulisan Bung Karno dan Bung Hatta yang sangat menekankan bahwa hari depan Indonesia hanya bisa bertahan secara bermakna jika dua pilar—demokrasi politik dan demokrasi ekonomi—berjalan beriring. Tanpa dua pilar kembar ini, jangan berharap bahwa tujuan kemerdekaan, berupa tegaknya keadilan yang merata bagi seluruh rakyat, akan tercapai.

Tentang Pancasila sebagai *common value* dan *common consensus* yang disoroti Bung Budiman, saya punya komentar singkat. Saya akur dengan itu semua, tetapi tragedi Pancasila jangan dibiarkan berlanjut. Apa itu? Sudah 65 tahun Pancasila tidak pernah menghilang dari konstitusi Indonesia yang gonta-ganti, tetapi apakah kita sudah semakin mendekati tujuan kemerdekaan kita berupa "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?" Jawabannya di mata saya masih negatif. Sebabnya sederhana tetapi sangat mendasar, yaitu sebagaimana terbaca dalam kalimat ini: "Pancasila ada dalam pembukaan UUD, dalam pidato, dalam buku pelajaran, dan tergantung dalam bungkus pigura cantik di kantor-kantor publik. Dalam realitas lebih banyak dikhianati tanpa rasa dosa."[21] Saya harap Bung Budiman tidak berbeda dengan saya dalam membaca perjalanan sejarah modern Indonesia sejak bangsa ini dinyatakan merdeka dari penjajahan asing bila ditinjau dari perspektif moral Pancasila.

---

[21]Lihat Ahmad Syafii Maarif, "Buruh Serabutan dan Skandal Century," *Kompas*, 3 April 2010.

Akhirul Kalam

Sebuah tradisi dialogis intelektual yang coba dikembangkan oleh institusi NMML (Nurcholish Madjid Memorial Lecture) pantas diberi apresiasi yang tinggi. Biasanya setelah sebuah pidato diucapkan oleh seseorang yang dipilih, forum diberi kesempatan untuk menyampaikan respons, kritik, saran, dan yang sejenis itu. Lalu pembicara menanggapinya secara lisan. NMML tidak hanya berhenti di situ, tetapi berangkat lebih jauh untuk mendalami benang merah pidato yang telah disampaikan, yaitu dengan meminta beberapa ilmuwan, pakar, dan pemikir yang dipandang mumpuni untuk memberikan tanggapan kritis secara tertulis. Tanggapan ini dikirimkan kepada pembicara yang memang telah pula menyiapkan konsep tertulis sebelumnya. Agar dialog lebih kaya dan produktif, maka tanggapan-tanggapan itu dijawab lagi oleh pembicara dalam NMML.

Maka bagian ke-III dari penerbitan ini berisi jawaban saya kepada tujuh penanggap di atas. Saya menyampaikan terima kasih baik kepada penanggap maupun kepada pihak penyelenggara NMML. Ini tradisi bagus yang patut benar dicontoh oleh lembaga-lembaga akademik lain agar suasana dialogis tingkat tinggi akan menjadi gelombang besar di ranah intelektual Indonesia. Segala kelemahan dalam makalah saya sampai batas-batas yang jauh telah ditutupi oleh para penanggap yang semuanya melakukannya dengan sungguh-sungguh.***

Indeks

A
Abbasiyah 116
Aceh 23
Aditya, Willy 73
Afghanistan 6, 9, 119
Ahmadiyah 43, 44
Aho, James 85, 88
Allport 87, 91
Amerika Serikat 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 67, 68, 71, 91, 118, yang plural 5, Latin 73, 74, 75
Aminuddin, Lia 44
Amnesti Internasional 120
Anderson, Benedict 35
Arato, Andrew 39, 40
Armstrong, Karen 12, 13
Asfinawati 108, 117, 119
Asia Tengah 6
Awwas, Irfan S. 22
Azahari, Dr. 20

B
Baha'i 43
Bali 85, 119
Bank Dunia 74
al-Banna, Hassan 21
Belanda 18, 67
Bhabha, Homi 36
Bhinneka Tunggal Ika 42, 48
Birmingham University 85
Bolivia 74
Bosnia Timur 67
Bourdieu, Pierre 62
Bung Karno 7, 75, 79, 97, 121
Bush, George W. 15, 85, 119

C
Cavanaugh, William T. 93, 116
Ceko 17
Chechnya 85
civil society 40, 98
Cohen, Jean 39, 40
Conboy, Ken 66
Confessing Church 84
Correa, Rafael 74
Cortright 84

D
Dar al-Harb 50; *Dar al-Islam* 50
Dekrit Presiden 78
Den Haag 67
Densus 88 20
Derrida, Jacques 47
Desantara 46
DI (Darul Islam) 20, 45
Dian Interfidei 46
Drake, Christine 100

E
Eden, Lia 43
Einstein, Albert 7
Eisenhower, Dwight David 7
Engels, Frederick 63
Erikson, Erik H. 82, 92
Eropa 7, 8, 13, 14, 15, 37
Esposito, John L. 12

F
El Fadl, Khaled Abou 113, 114
Farrakhan, Louis 5
Foucault, Michel 47
Fouda, Farag 117
FPI (Fron Pembela Islam) 21, 22, 23, 65
Fukuyama 100
Furnivall 96

G
Galtung, Johan 86, 92
GAM (Gerakan Aceh Merdeka) 20
Gedung Putih 15
Gorbachev, Mikhail 6
GPM (Gerakan Papua Merdeka) 20
Guantanamo 67, 119

H
Habermas 66
HAM 59, 60, 67, 68, 69
Hardiman, F. Budi 67
Hasibuan, Imran 79
Hatta 110
Haur Koneng 23
Havel, Václav 17
Hefner 96
Heidegger, Martin 8, 123
Hiariej, Eric 50, 108, 122
Hidayat, Komaruddin 5
Hiroshima 7
Hitler 7, 8, 13, 83
Hizb ut-Tahrir (HT) 22, 23, 24, 25, 61, 62, 63; Indonesia (HTI) 21, 46, 61, 62
Hoffman, Murad 10, 11, 16, 51
Hull, John M. 85, 86
Human Rights Watch 120
Huntington, Samuel 71
Hussein, Saddam 119

I
ICRP 46
Ikhwan 23, 26
al-Ikhwân al-Muslimûn 21
Indian 74
Inggris 5, 12, 13, 14, 85
Inglehart, Ronald 6
Institut Studi Timur Dekat dan Timur Tengah 12
Irak 9, 67, 68, 119
Iran 112
Iskandar, Arief B. 23
Israel 12, 13, 118

J
Jaggi, C. 45
Jahroni, Jajang 22, 23
Jamhari 22, 23
al-Jawi, M. Shiddiq 23, 24
Jepang 7
Jerman 7, 15, 83
John, St. 87
Ju Lan 100

K
Kashmir 9
Katolik 5
Kauffman, L.A. 4
Kazakhstan 62
Kearns 97
Khisbiyah, Yayah 81, 108, 115
Kieser, Bernhard 40
King, Martin Luther 5, 84
Konstantinopel 15
Krieger, D. 45
Kroasia 67
Küng, Hans 111

L
Lampung 23
Laut Kaspia 6
Leila Lu 75
Lewis 12
Lewis, Bernard 12, 13
Lombok 44
London 15; bom di London 15, 71
Los Angeles 68

M
Maarif, Ahmad Syafii 8, 33, 41, 71, 74, 81, 87, 94, 125; Buya Syafii 5, 6, 7, 8, 44,

52, 54, 58, 80, 101
Madinah 42
Madiun 20
Madjid, Nurcholish vi, 18, 27, 30, 42, 71, 78, 99, 107, 108, 126; NMML v, vi; Cak Nur 6, 7, 28, 29, 101
Madrid 15, 71; bom Madrid 15
Mahmood, Cynthia 48
Majelis Mujahidin Indonesia 47
Makkkah 42
Malcolm X 84
Maluku 103
Maman, DR. H. U. Kh 24
Marxisme 20
al-Maududi, Abul A'la 22
Mays 87, 89
McCrone, David 34
Mesir 11, 20, 21, 22
Mestizo 74
MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) 21, 22
Mohamad, Goenawan 5
Morales, Evo 74
Muhammadiyah vi, 19, 21
MUI 47, 49
Mujahidin 6
Mulia, Siti Musdah 42, 108, 109, 115
Mussadeq, Ahmad 44
Myers 84

N
al-Nabhani, Taqiyuddin 23
Nagasaki 7
Nashir, Haedar 22
NATO (North Atlantic Treaty Organization) 7
Nazi 83, 84
New York 84
Nobel 11
Norris, Pippa 6
NU 19, 21
Nusa Tenggara Timur 44

O
Obama, Barack H. 11, 118
Orde Baru 45, 46, 73, 75, 76, 98
Orde Lama 45, 96, 98, 99
Osama bin Laden 20, 123

P
PADMA (Padepokan Musa Asy'arie 23
Pahlevi, Shah Reza 84
Pakistan vii, 22,
Palestina 9, 13, 118, 120
Pancasila 18, 19, 28, 69, 75, 76, 79, 125
Pariela, Tonny D. 108, 124
PBB 67, 120
PD I vi, vii; II 6, 7, 8, 13, 19, 85, 116
Pemberontakan PRRI/Permesta 20
Perancis 5, 14
Perang Dingin 5, 6, 71
Perang Pasifik 7
Perang Salib 15
Perang Siffin 17
pergerakan nasional, PI 19
Perjanjian Versailles 7
Pettigrew 91
Piagam Madinah 26
PKI (Partai Komunis Indonesia) 20, 21, 110
PKS (Partai Keadilan Sejahtera) 21, 22, 26
Poiters 15

Q
al-Qaedah 20
al-Qardhawi, Yusuf 25
Quebeck v
al-Qurtuby, Sumanto 48
Quthb, Sayyid 22

R
Rahman, Fazlur vii, 114, 115
Rajeswari Sunder Rajan 35
RMS (Republik Maluku Selatan) 20
Robet, Robertus 76
Roosevelt, Franklin D. 7
Roy, Yusman 44
Rusia 6, 85

S
Salafis 14, 53
Sampang 23

Santoso, Thomas 45, 46
Saudi Arabia 20, 112, 115
Schlesinger, Arthur M. 15
Scott, Peter Dale 76
Sebastian, Mrinalini 36
September 11 2001 11, 15, 67, 71, 84
Serbia 67
Shiddiq 23
Sinaga, Dr. Martin Lukito 33, 108, 120
Slovan 91
Smith, Jane I. 10
SNCC (the Student Nonviolent Coordinating Committe 4
Soekarno 78
Spanyol 4, 74
Spivak, Gayatri 38
Srebrenica 67
Staub 83
Stephan 87
Sudjatmiko, Budiman 71, 74, 108, 124
Sumpah Pemuda 18, 19, 95, 118
Suryadinata, Leo 109
Syi'ah 112

T
Tammam, Hossam 11
Tanjung Priok 23
Tembok Berlin 71
The Nation of Islam 5
Tibi, Bassam 10, 13, 14, 15, 16, 22, 51
Timur Tengah 42
Top, Noordin M. 20
Toynbee, A.J. 116
Truman 7
Turki Usmani 15

U
Umayyah 116
UNESCO 88
Uni Eropa 10
Uni Soviet 6
Uni Soviet 6, 71
Universitas Paramadina v, 107
UUD 1945 8, 74, 125
Uzbekistan 62

V
Vatican 42, 111
Vattimo, Ginni 123

W
Wadjdi, Farid 24, 63
Wahabi 22, 114; Wahabisme 110
Wahid, Abdurrahman 7
Wareeth Din Muhammad 5
Washington D.C. 12
Wayame 102, 103
Webel 84
WTC 84

Y
Yahudi 42, 43, 71, 83; *dirty Jews* 13
Yogyakarta 23
Yunanto 66

Z
Zabelka, G. 85
al-Zawahiri, Ayman 20
Zewali, Dr. Ahmad 11
Zhahiriyyah 25
Zionis 12, 13, 118; Zionisme 13, 120; staunch Zionists 12

Tentang Penulis

Ahmad Syafii Maarif adalah Guru Besar bidang sejarah di Universitas Negeri Yogyakarta. Dia lahir di Sumpurkudus, Sumatra Barat, pada tanggal 31 Mei 1935. Selepas SD, dia melanjutkan pendidikan SMP dan SMA di sekolah Muhammadiyah di Yogyakarta. Tahun 1968, dia lulus dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP), Yogyakarta. Gelar MA dalam bidang sejarah ia raih dari Ohio University, Athens, Ohio, Amerika Serikat, pada 1980 atas Beasiswa Fullbright. Sementara itu, gelar doktor ia peroleh dari University of Chicago, juga di Amerika Serikat, 1983, dalam bidang pemikiran Islam. Selain dosen, dia juga pernah menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhamamdiyah, 1999-2004. Kini, di lembaga tersebut, ia menjabat sebagai Dewan Pembina PP Muhammadiyah. Pada tahun 2003, ia mendirikan Maarif Institute, lembaga yang hingga kini aktif mengampanyekan Islam dan pluralisme di Indonesia. Atas konsistensinya sebagai intelektual, dia diganjar tiga penghargaan: Presiden Megawati Award (2003), Hamengkubuwono IX Award (2004) dan Ramon Magsaysay Award (2008). Dia antara lain menulis buku *Islam dan Masalah Kenegaraan* (1985), *Muhammadiyah dan Politik Islam* (2005), *Titik-titik Kisar di Perjalananku: Autobiografi Ahmad Syafii Maarif* (2006), dan *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan* (2009).

Asfinawati adalah penggiat hak-hak asasi manusia. Dia lahir di Bitung, Sulawesi Utara, 26 November 1976. Advokat ini adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dia pernah menjabat sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta (2006-2009).

Budiman Sudjatmiko adalah anggota DPR RI dari Fraksi PDIP. Dia juga Direktur Res Publica Institute, lembaga yang mengkaji pertahanan dan ekonomi politik internasional. Dia pernah mengetuai Partai Rakyat Demokratik (PRD) tahun 1996-2001. Gelar master ia peroleh dari Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Cambridge, Inggris. Tulisannya dapat dijumpai di berbagai media massa nasional. Dia menulis tesis untuk program Master berjudul "Dynamics and Competition between the MFA (Ministry of Foreign Affairs) and the PLA (People's Liberation Army) in the China's Foreign Policy Making: Cases of Spartley Islands, Taiwan, and Diaoyutai."

Eric Hiariej adalah staf pengajar pada Jurusan Hubungan Internasional, Fisipol, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dia kini sedang menyelesaikan studi pascasarjananya pada Australian National University (ANU), Canberra, Australia.

Martin Lukito Sinaga adalah teolog yang kini bekerja selaku "Study Secretary for Theology and the Church" di lembaga Federasi Gereja-gereja Lutheran se Dunia (Lutheran World Federation). Dia juga adalah pendeta di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS). Dari tahun 2001-2008 dia bekerja selaku dosen di Sekolah Tinggi Teologi (STT) Jakarta. Studi teologi dan agama-agama ditempuhnya di Jakarta dan di Universitas Hamburg, Jerman. Salah satu tulisannya seputar tema identitas diterbitkan oleh penerbis LKiS (Yogyakarta, 2004) dengan judul, "Identitas Poskolonial Gereja-Suku dalam Masyarakat Sipil."

Siti Musdah Mulia adalah dosen pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Gelar doktor dia raih dalam bidang pemikiran politik Islam di kampus yang sama. Selain dosen, dia kini menjabat Ketua Umum Indonesia Conference of Religion and Peace (ICRP), sebuah organisasi kemasyarakatan yang peduli terhadap isu agama dan perdamaian. Hingga kini, dia tercatat pula sebagai peneliti pada Balitbang Departemen Agama Pusat, Jakarta. Pada tahun 2009, dia meraih penghargaan *Women of the Year 2009* dari International Prize for Women of the Year, Italia.

Tonny Donald Pariela adalah Guru Besar Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pattimura, Ambon.

Pendidikan Master ia raih di Northern Territorry University (sekarang Charles Darwin University), Darwin, Australia. Sementara, gelar doktor ia raih di dari Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Jawa Tengah. Selain aktif mengajar, ia juga kini menjadi Ketua Umum KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia), Kota Ambon. Disertasinya terbit dengan judul *Damai di Tengah Konflik Maluku* (2008).

Yayah Khisbiyah adalah dosen Fakultas Ilmu Psikologi Universitas Muhammadiyah, Surakarta. Dia, bersama beberapa temannya, mendirikan The Center for Cultural Studies and Social Change, dan menjadi direktur hingga tahun 2005. Dia meraih master dari Departemen Psikologi Sosial/Komunitas dari University of Massachusetts, AS (1997), atas dukungan dari beasiswa Fulbright. Kini dia tengah menyelesaikan program doktor dalam bidang psikologi di University of Melbourne, Australia, atas dukungan the Australian Development Scholarship and the Ford Foundation.